

BAB V

PEMBAHASAN HASIL TEMUAN

A. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini di TK-IT Mutiara Hati Kalitidu Bojonegoro

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan telah diwujudkan dengan munculnya sekolah-sekolah/ pendidikan swasta yang di kelola swasta. Yang jumlahnya lebih besar dibanding sekolah negeri, sekolah / lembaga pendidikan yang bermutu membutuhkan dukungan dari masyarakat dan biaya yang besar karena harus menyediakan sarana prasarana untuk mendukung para pendidik dan anak didik, untuk menggali sumber dana dalam membiayai pendidikan yang bermutu diperlukan kemampuan profesional agar mampu mengorganisasikan kebutuhan masyarakat sehingga mereka mendukung dan membiayai pendidikan yang dibutuhkan. Dalam pendidikan peran serta tanggung jawab masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam memberi arah yang lebih baik sebab tanggung jawab pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab moral dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok sosial¹.

Tidak hanya itu dengan keswadayaan diharapkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi besar. Ketika partisipasi ini menjadi besar maka secara otomatis makin besar pula rasa

¹ Bedjo sujianto, *menejemen pendidikan berbasis sekolah*, CV Sagung seto, jakarta, 2007, hal. 8

memiliki masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dan dalam kondisi seperti itu masyarakat akan dengan sendirinya ikut memantau, memberikan masukan dan bahan menjaga keberlangsungannya. Dari hal-hal yang bersifat fisik seperti bangunan, alat peraga dan semua bahan penunjang pendidikan akan dijaga dan dirawat oleh masyarakat dengan sepenuh hati.

Berdasarkan pembahasan di atas yang menyinggung betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan. Secara lebih luas partisipasi disini dapat ditafsirkan bahwa keberperanan masyarakat pada hakekatnya sangat penting, karena apapun yang dihasilkan tidak dengan melalui pelibatan masyarakat dalam seluruh prosesnya akan mengakibatkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada diri mereka untuk terus mengawal, merawat, menjaga keberlangsungannya².

Dalam peraturan pemerintah No. 39 tahun 1992 BAB III pasal 4 peran serta / partisipasi masyarakat dapat berbentuk:

- ❖ Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.

² www.kompasiana.com/ partisipasi masyarakat dalam pendidikan.selasa 25-08-2015 jam 15:13.

- ❖ Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidikan untuk melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/ pelatihan peserta didik.
- ❖ Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/ penelitian dan pengembangan.

Masyarakat sudah merasakan dampak yang positif setelah terbukti dengan perubahan yang terjadi pada anak-anaknya yang mempunyai akhlakul karimah, mandiri dan cerdas, masyarakat juga antusias dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan disekolah misalnya dalam kegiatan PHBI dan PHBN, outing, rekreasi dan lain-lain³.

B. Upaya TK-IT Mutiara Hati yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar membantu dalam mewujudkan perkembangan pembangunan pendidikan.

Kemunculan paradigma yang berbasis masyarakat di picu oleh arus besar modernisasi dalam dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan.

Sebelum berupaya untuk menarik dukungan masyarakat luas agar berpartisipasi terhadap TK-IT Mutiara Hati Kalitidu, melakukan berbagai strategi dan upaya membenahi internal sekolah untuk meningkatkan mutu sekolahnya. Upaya ini dilakukan untuk menarik dukungan masyarakat

³ Hasil wawancara dengan ibu muti hari sabtu 15 april 2015, jam 09.00

yang ingin menyekolahkan anaknya di TK-IT Mutiara Hati kalitidu, dengan target masyarakat yang berkemampuan secara ekonomi⁴. Dengan mengharapkan orang tua siswa yang berkemampuan secara ekonomi ini, setidaknya akan memberikan dampak positif, terutama pada peningkatan partisipasi finansial. Karena di era otonomi dan penerapan MBS pada sekolah, sekolah dituntut harus lebih kreatif dan inovatif mencari dana secara mandiri untuk membiayai sekolah. Tidak hanya itu trobosan yang dilakukan yakni membentuk POS (paguyuban sekolah dan humas), upaya ini dilakukan sebagai ikhtiar untuk mendapatkan partisipasi yang lebih besar terutama dalam bentuk dana dan pemikiran. Dan yang lebih menonjol melakukan pendekatan sosial keagamaan⁵.

⁴ Mukhrizal Arif, *pendidikan pos modernisme*, ar-ruzzz media, yogyakarta, 2914, hall 30

⁵ www.kompasiana.com/ partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Selasa 25-08-2015 jam 15:13.